



**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
2022**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya sehingga ***Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID Tahun 2022***" Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat diselesaikan sebagaimana waktu yang telah ditentukan.

Maksud dan tujuan disusunnya laporan ini adalah sebagai salah satu bentuk pengelolaan badan-badan publik yang dipertanggungjawaban kepada masyarakat, atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini dilaksanakan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Kalimantan Tengah dimana pemerintahan diselenggarakan dengan transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Hal ini mengisyaratkan adanya peran serta aktif dari berbagai komponen masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

Demikian laporan ini dibuat semoga bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Palangka Raya, Maret 2023

Plt. Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Tengah

H. RISKY R. BADJURI, ST., MT

NIP. 19670416 199803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	2
D. Sistematika Pelaporan	3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Struktur Organisasi PPID Pembantu	4
B. Tupoksi dan Fungsi PPID Pembantu	5
C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik	5
D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik	6
BAB III GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya	7
B. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi beserta kualifikasinya	8
C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik	8
BAB IV RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	9
B. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi	9
C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya	9
D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	17
BAB V RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	
A. Jumlah Keberatan Yang Diterima	18
B. Tanggapan atas Keberatan Yang Diterima	18
C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi	18
D. Hasil Mediasi dan atau Putusan Ajudikasi Komisi Informasi	18

BAB VI KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	19
BAB VII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
A. Rekomendasi	20
B. Rencana Tindak Lanjut	20
LAMPIRAN 1 JUMLAH PEMOHON INFORMASI	21
LAMPIRAN 2 JADWAL PELAYANAN INFOEMSI PUBLIK	22
DOKUMENTASI PEMOHON INFORMASI	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam implementasinya secara komprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik.

Hadirnya Undang-Undang ini menjamin hak masyarakat untuk mengetahui tentang lembaga Badan Publik Pemerintah serta kebijakan tentang kebijakan atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Untuk itulah maka berdasarkan pada informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Badan Publik sebagai penyelenggara Negara telah menjalankan kewajiban-kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak warga Negara, dan sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi pelayanan kepada publik.

Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan.

Disamping itu, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai Badan Publik, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan kewajiban Badan Publik dalam pelayanan informasi sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 khususnya pasal 4 huruf j, PPID Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk menyusun laporan capaian kinerja Tahun 2022 sekaligus sebagai bahan evaluasi program kegiatan PPID ke depan. Dengan harapan keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan kebijakan yang tepat dan tata kelola Pemerintahan yang baik menuju open government.

C. LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasar pada:

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2016 Tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penulisan Laporan ini berisi tentang:

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik
3. Bab III Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik
4. Bab IV Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5. Bab V Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6. Bab VI Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi
7. Bab VII Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

B A B II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA

- I. Pengarah : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah

- II. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 - 1. Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan
 - 2. Kepala Bidang Perbenihan dan Budidaya
 - 3. Kepala Bidang PUPKPPP
 - 4. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
 - 5. Kepala Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih (BP3B)
 - 6. Kepala Balai Benih dan Kebun Produksi (B2KP) Pundu

- III. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu : Sekretaris
 - a. Bidang Pelayanan Informasi :
 - 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2. Rini Fatmawati, SP
 - 3. Levrita Rahayunie, SP

 - b. Bidang Pengelolaan Informasi :
 - 1. Kepala Seksi Pengembangan Investasi
 - 2. Kepala Seksi Pengamanan Usaha Perkebunan
 - 3. Siwang, SP

 - c. Bidang Pengelolaan Dokumen dan Arsip :
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Nanik Sunarsiwi, SP
 - 3. Susana Hexaisokta, SP

B. TUPOKSI DAN FUNGSI PPID PELAKSANA

a. Pengarah

Yang bertindak sebagai Pengarah adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, yang memiliki wewenang untuk memberikan arahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan terkait PPID Pelaksana Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Memiliki tugas dan fungsi yaitu :

1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi;
3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja di bidang pelayanan informasi, pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip, pengaduan dan penyelesaian sengketa.

C. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan layanan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, penyediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan identifikasi serta pengumpulan informasi yang dikecualikan.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi publik (Perki 1 Tahun 2010), Kementerian Keuangan wajib untuk mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh pengguna dan pemohon informasi publik pada website Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dengan alamat *disbunkalteng.go.id* Selain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta juga dapat diakses oleh pengguna dan pemohon informasi publik pada website Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah *disbunkalteng.go.id* atau datang langsung ke Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah di Jl. Jenderal Soedirman No. 18 Palangka Raya pada setiap jam kerja.

D. JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan terhadap Permintaan Informasi Publik pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan setiap Hari Senin – Jum'at dari Pukul 08.00 – 13.00 WIB, di ruang Sub Bagian Penyusunan Program Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Jl. Jenderal Soedirman No 18 Palangka Raya, nomor telepon 0536 – 3221363.

BAB III
GAMBARAN UMUM
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

A. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media sebagai berikut:

1. Melalui website <http://disbunkalteng.go.id>
2. Help desk/layanan langsung/frontdesk

B. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi beserta kualifikasinya

Secara operasional PPID Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh SDM yang beranggotakan dari Bidang Teknis dan Seksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

- | | | |
|---|---|---|
| I. Pengarah | : | Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah |
| II. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan2. Kepala Bidang Perbenihan dan Budidaya3. Kepala Bidang PUPKPPP4. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan5. Kepala Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih (BP3B)6. Kepala Balai Benih dan Kebun Produksi (B2KP) |
| III. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu | : | Sekretaris |
| a. Bidang Pelayanan Informasi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program2. Rini Fatmawati, SP3. Levrita Rahayunie, SP |
| b. Bidang Pengelolaan Informasi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Seksi Pengembangan Investasi2. Kepala Seksi Pengamanan Usaha Perkebunan3. Siwang, SP |
| c. Bidang Pengelolaan Dokumen dan Arsip | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian2. Nanik Sunarsiwi, SP3. Susana Hexaisokta, SP |

C. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya

Pada Tahun 2022, tidak ada alokasi anggaran untuk PPID Pelaksana Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, pada tahun 2023 telah dialokasikan honorarium untuk tim PPID Pelaksana Dinas Perkebunan Prov. Kalteng.

BAB IV

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi yang masuk tahun 2022 sebanyak 49 orang, sedangkan pengunjung untuk permintaan data statistik pada website disbun.kalteng.go.id sampai saat ini belum bisa diakses. Hal ini karena adanya kendala teknis pada website Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung dan melalui email.

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan baik sebagian atau Seluruhnya

Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya disajikan dalam tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut:

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA

JANUARI							
No.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT / NO TELPON	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PERMOHONAN	INFORMASI / DATA YANG DIBERIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	06/01/2022	Rio Heykhal Belvage	UGM	Mahasiswa	Data Perkebunan se Kalteng	Bahan penelitian	Dokumen
2	11/01/2022	M. Hanif Naufal	BPS Prov. Kalteng	PNS	Data Perhitungan PDRB Triwulan IV Tahun 2021	Data dukung perhitungan PDRB Kalteng	Data
3	18/01/2022	Ary Cahyani	DKP Prov Kalteng	PNS	Data Sektor Perkebunan tahun 2021	Data dukung penyusunan Sasaran Produksi Pangan daerah Tahun 2022	Data
4	21/01/2022	Bid. Perencanaan dan Evaluasi, Subbid Pendanaan Pembangunan	Bappedalitbang	PNS	Data Luas Areal dan Produksi Perkebunan Kateng	Bahan penyusunan data pembangunan perkebunan Prov Kalteng	Data
5	21/01/2022	Bappedalitbang	Bappedalitbang	PNS	Data Pembangunan Perkebunan di Kalteng	Bahan penyusunan potensi unggulan dan peluang investasi sektor perkebunan di Kalteng	Data

FEBRUARI							
No.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT / NO TELPON	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PERMOHONAN	INFORMASI / DATA YANG DIBERIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	04/02/2022	Hendri Pahlan	Biro Perekonomian	PNS	Data Perkebunan Kalteng	Bahan Kajian	Dokumen
2	04/02/2022	Grasela Novita	BPS Prov. Kalteng	PNS	Data Statistik Perkebunan Tahun 2021	Bahan Penyusunan Kalteng Dalam Angka	Dokumen

MARET							
No.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT / NO TELPON	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PERMOHONAN	INFORMASI / DATA YANG DIBERIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	23/03/2023	Richard Ilham N.	Universitas Palangka raya	Mahasiswa	Data Komoditas Kelapa Dalam di Kab. Pulang Pisau	Konsultasi Data untuk penyusunan skripsi	Data

APRIL							
No.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT / NO TELPON	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PERMOHONAN	INFORMASI / DATA YANG DIBERIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	04/02/2022	Arif H	LKBN Antara	Swasta	Luas lahan dan produksi kelapa	Bahan penelitian	1 dokumen
2	06/04/2022	Wildo Saputra	UPR	Mahasiswa	Permintaan Data	Penyusunan Bahan Kajian	Data
3	10/04/2022	Dwi Indri Arieska	BPS Prov. Kalteng	PNS	Data Perkebunan Kalteng Triwulan I Tahun 2022	Konsultasi data untuk Perhitungan PDRB Prov. Kalteng	Data/Dokumen

MEI							
No.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT / NO TELPON	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PERMOHONAN	INFORMASI / DATA YANG DIBERIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	17/05/2022	Wena Helda	Walhi Kalteng	Konsultan Lingkungan	Data Perijinan	Bahan Kajian	Data
2	23/05/2022	Wena Helda	Walhi Kalteng	Konsultan Lingkungan	Data dan Informasi Perkebunan Prov. Kalteng	Bahan Kajian	Dokumen

JUNI							
No.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT / NO TELPON	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PERMOHONAN	INFORMASI / DATA YANG DIBERIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	14/06/2022	Dina F.	Biro Pemerintahan dan Otda	PNS	Dukungan Data Stakeholder	Penyusunan Bahan Kajian	Dokumen
2	14/06/2022	Lila Tansa	Biro Pemerintahan dan Otda	PNS	Dukungan Data Stakeholder	Penyusunan Bahan Kajian	Dokumen
3	14/06/2022	Teguh Setio Utomo	Dinas Pertanian Kab. Kapuas	PNS	Program dan Kegiatan Perkebunan 2023	Bahan Penyusunan Program dan Anggaran 2023	Dokumen
4	14/06/2022	Lewi Yuda	Dinas Pertanian Kab. Kapuas	PNS	Konsultasi PSR	Bahan penyusunan usulan PSR	Data
5	14/06/2022	Mikelin	Universitas Palangka Raya	Mahasiswa	Data luas areal perkebunan di Kalteng	Bahan Penelitian	Data
6	29/06/2022	Erniasi S.	Universitas Palangka Raya	Mahasiswa	Data perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kab. Pulang Pisau	Bahan Penelitian dan penyusunan skripsi	Data
7	30/06/2022	Holysangtus Frangky	Universitas Palangka Raya	Mahasiswa	Data luas areal dan produksi komoditi perkebunan	Bahan Penyusunan Skripsi	Data
8	30/06/2022	Rinto	Universitas Palangka Raya	Mahasiswa	Data luas lahan perkebunan di Kalteng	Bahan Penyusunan Skripsi	Data

JULI							
No.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT / NO TELPON	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PERMOHONAN	INFORMASI / DATA YANG DIBERIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01/07/2022	Biro Adpem	Setda Prov Kalteng	PNS	Data dukung pengisian SDDKN	Bahan kebijakan pembangunan	Data
2	05/07/2022	Dwi Indri Arieska	BPS Prov. Kalteng	PNS	Data Perkebunan Kalteng Triwulan II	Konsultasi data untuk Perhitungan PDRB Prov. Kalteng	Data/Dokumen
3	06/07/2022	Nurhalina	Virama Karya, Saman Corp - PUPR	Konsultan PUPR	Data Luas Lahan, Produksi Provinsi dan Kab. Murung Raya	Data digunakan untuk Bahan Kajian	Data Statistik Perkebunan
4	11/07/2022	Ahmad Baseri	Badan Restorasi Gambut Mangrove	Fasilitator Desa	Data dan Informasi HSBJ Provinsi	Data digunakan untuk penulisan skripsi	Dokumen HSBJ
5	11/07/2022	Mei Yogi	Badan Restorasi Gambut Mangrove	Fasilitator Desa	Data dan Informasi HSBJ Provinsi	Data digunakan untuk penulisan skripsi	Dokumen HSBJ
6	11/07/2022	Dwi Indri Arieska	BPS Prov. Kalteng	PNS	Data Perkebunan Kalteng Triwulan II Tahun 2022	Konsultasi data untuk Perhitungan PDRB Prov. Kalteng	Data/Dokumen
7	28/07/2022	Bayu Rahmita	Dinas Pertanian Kab. Barito Utara	PNS	Konsultasi STDB	Bahan Penyusunan Usulan STDB	Data/Dokumen

AGUSTUS							
No.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT / NO TELPON	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PERMOHONAN	INFORMASI / DATA YANG DIBERIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	09/08/2022	Grasela Novita T.	BPS Prov. Kalteng	PNS	Rekomendasi Statistik	Data digunakan untuk Penyusunan Rekomendasi	Dokumen

AGUSTUS							
No.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT / NO TELPON	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PERMOHONAN	INFORMASI / DATA YANG DIBERIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2	09/08/2022	Putri Ageng P.	BPS Prov. Kalteng	PNS	Data Statistik Perkebunan	Untuk Penyusunan Data Statistik Sektoral	Dokumen
3.	09/08/2022	Fikry Al Katiri	BPS Prov. Kalteng	PNS	Data PMTB	Untuk penyusunan Disagregasi PMTB	Dokumen
4.	22/08/2022	M. Hanif Naufal	BPS Prov. Kalteng	PNS	Survei PMTB	Penyusunan Metadata	Data
5.	22/08/2022	Rumung Rama	DKPP Kota	PNS	Konsultasi Data Statistik	Penyusunan Data Statistik	Data

SEPTEMBER							
No.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT / NO TELPON	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PERMOHONAN	INFORMASI / DATA YANG DIBERIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	08/09/2022	Norhalimah	BPTD Wil. XVI Prov. Kalteng	PNS	Data Narahubung Perkebunan	Untuk narahubung kegiatan survei	Data
2	08/09/2022	Gabriela	BPTD Wil. XVI Prov. Kalteng	PNS	Data sebaran perkebunan	Inventarisasi Data Perkebunan	Data/Dokumen
3	14/09/2022	Maulana Rizky N.	Bag. Perencanaan Setditjen Perhubungan Darat	PNS	Data sebaran dan pergerakan hasil perkebunan di Kalteng	Bahan Kajian/Studi	Data/Dokumen
4	14/09/2022	Zianida Fira N.	Bag. Perencanaan Setditjen Perhubungan Darat	PNS	Data sebaran dan pergerakan hasil perkebunan di Kalteng	Bahan Kajian/Studi	Data/Dokumen

SEPTEMBER							
No.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT / NO TELPON	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PERMOHONAN	INFORMASI / DATA YANG DIBERIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
5	14/09/2022	Ratna Kusumwardhani	PT. Kreasi Pola Utama	Konsultan	Data sebaran luas dan hasil perkebunan di wilayah Kalteng	Bahan Studi keterpaduan Program Trans Darat terhadap Sektor Unggulan di Prov. Kalteng	Dokumen
6	14/09/2022	Zaid Zulkarnain	PT. Kreasi Pola Utama	Konsultan	Data sebaran luas dan hasil perkebunan di wilayah Kalteng	Bahan Studi keterpaduan Program Trans Darat terhadap Sektor Unggulan di Prov. Kalteng	Dokumen
7	15/09/2022	Fixseria Stempema	DPMPTSP Prov. Kalteng	PNS	Data Luas, Produksi dan Perijinan di Kalteng	Data digunakan untuk bahan kajian	Data
8	17/09/2022	Fery Kurniadi	Universitas Palangka Raya	Mahasiswa	Data Kelapa Dalam di Kab. Kotim	Data dukung penyusunan skripsi	Data
9	19/09/2022	Edo Irawan	Universitas Palangka Raya	Mahasiswa	Data Komoditas Perkebunan Kalteng	Data pendukung penulisan skripsi	Data
10	20/09/2022	Tresno Santoso	Universitas Palangka Raya	Mahasiswa	Data Komoditas Karet Kalteng	Konsultasi Data Karet untuk bahan penulisan skripsi	Data
11	26/09/2022	Saiful Bahri	Universitas Palangka Raya	Mahasiswa	Data Luas dan Produksi Kelapa Sawit	Bahan untuk penyusunan skripsi	Data

OKTOBER							
No.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT / NO TELPON	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PERMOHONAN	INFORMASI / DATA YANG DIBERIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	04/10/2022	Dwi Indri Arieska	BPS Prov. Kalteng	PNS	Data Dasar Triwulan III Thn. 2022	Data pendukung Perhitungan PDRB Prov. Kalteng	Dokumen
2	04/10/2022	M. Fikrie Hazami	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	PNS	Data Perkebunan Kalteng	Data pendukung Roadmap Peta Data HIS Tahun 2022	Dokumen
3	10/10/2022	Talizza Mega Berliana	Universitas Palangka Raya	Mahasiswa	Data Series Kelapa Dalam di Kalteng tahun 2017 – 2022	Data pendukung penyusunan skripsi	Data
4	25/10/2022	Endang Sarah	DLH Prov. Kalteng	PNS	Renstra Disbun Tahun 2021 – 2026	Bahan Kajian/Studi Lingkungan	Dokumen
5	25/10/2022	Santosa Yulianto	Universitas Palangka Raya	PNS	Renstra Disbun Tahun 2021 – 2026	Data Pendukung Studi	Dokumen

NOVEMBER							
No.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT / NO TELPON	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PERMOHONAN	INFORMASI/DATA YANG DIBERIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-

DESEMBER							
No.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT / NO TELPON	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PERMOHONAN	INFORMASI/DATA YANG DIBERIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

No	Tanggal	Nama Pemohon	Alamat/ Telpn	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Permohonan	Alasan Ditolak
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-

BAB V

GAMBARAN UMUM

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Jumlah Keberatan Yang Diterima

No.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT/TELPON	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-

B. Tanggapan atas Keberatan Yang Diberikan dan Pelaksanaannya

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini tidak terdapat sengketa informasi.

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

No.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT/TELPON	PEKERJAAN
1	2	3	4	5
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-

D. Hasil Mediasi dan / atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini tidak terdapat sengketa informasi sehingga tidak ada hasil mediasi ataupun keputusan ajudikasi Komisi Informasi.

BAB VI

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Kendala dan hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah adanya keraguan satuan penghasil informasi, ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.

Selain hal tersebut di atas, dukungan penganggaran untuk PPID masih sangat minim bahkan bisa disebut tidak ada anggaran untuk PPID Pelaksana Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022.

BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Rekomendasi

Untuk meningkatkan mutu pelayanan Informasi dan Dokumentasi, direkomendasikan hal – hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat memberikan alokasi anggaran untuk Operasional PPID pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, karena selama ini kegiatan PPID Pelaksana tanpa biaya operasional
2. Kepada Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah sebagai PPID Utama dapat mengusulkan Honorarium Petugas PPID Pelaksana untuk dimasukkan di HSBJ Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Dibuat Landasan Hukum atau Regulasi terkait Honorarium dan Operasional PPID Pelaksana, dengan koordinator Diskominfoantik Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Rencana Tindak Lanjut

Solusi untuk mengatasi hambatan – hambatan yang ada adalah dengan berpedoman pada “Kerja Iklas, Kerja Cerdas dan Kerja Tuntas”

Lampiran 1.

JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK

Rincian jumlah permohonan informasi yang masuk tahun 2022 sebanyak 49 orang.

No	Bulan	Jumlah Pemohon Informasi	Keterangan
1	2	3	4
1	Januari 2022	5 orang	Permohonan dikabulkan
2	Februari 2022	2 orang	Permohonan dikabulkan
3.	Maret 2022	1 orang	Permohonan dikabulkan
4.	April 2022	3 orang	Permohonan dikabulkan
5.	Mei 2022	2 orang	Permohonan dikabulkan
6.	Juni 2022	8 orang	Permohonan dikabulkan
7.	Juli 2022	7 orang	Permohonan dikabulkan
8.	Agustus 2022	5 orang	Permohonan dikabulkan
9.	September 2022	11 orang	Permohonan dikabulkan
10.	Oktober 2022	5 orang	Permohonan dikabulkan
11.	November 2022	-	Permohonan dikabulkan
12.	Desember 2022	-	Permohonan dikabulkan
Total pemohon informasi		49 orang	

Lampiran 2.

JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Waktu Pelayanan

Pelayanan Permintaan Informasi Publik setiap hari kerja, di ruang Sub Bagian Penyusunan Program Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Jl. Jenderal Soedirman No 18 Palangka Raya, nomor telepon 0536 – 3221363.

Senin – Kamis :

- 08.00 WIB – 11.00 WIB
- 13.00 WIB – 15.00 WIB

Jumat :

- 08.00 WIB – 10.30 WIB
- 13.00 WIB – 15.00 WIB

B. Proses Penyelesaian Informasi Publik

- Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan, yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung dan melalui email.

DOKUMENTASI PELAYANAN INFORMASI







